

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofar Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII. Pers, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- _____, S.H., 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- _____, 2007, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenasa Media Group, Jakarta

- Boedi Harsomo. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Keduabelas, Djambatan, Jakarta
- _____. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta
- Cansil dan Cristhine Cansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chairul Huda, 2002, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prana Media, Jakarta
- _____, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- D.schafmeister, N.Kijzer, E.PH.Sitorus, Editor J.E.Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Libert, Yogyakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbanag Pressindo, Yogyakarta.
- G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, 2010, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Reflika Aditama, Bandung
- _____, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap Undang-undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cetakan 2, Bandung, PT. Refika Aditama
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya
- Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung

- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya
- Jayadi Setiabudi. 2015. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*. Buku Pintar, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Lilik mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung
- M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, Bandung
- M. Marwan dan jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- M.A Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan melawan hukum*, Pratnya paramita, Jakarta.
- M.Ali Boediarso, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta
- Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, cet ke 3 , Bandung
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.

- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt.Sinar Baru, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta
- S. Soetrisno dalam Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta
- Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Cetakan Ke 1. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Libert, Yogyakarta
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III)

- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
(selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II)
- Suharsimi Arikunto. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, 1996, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suteki dan Galang Taufani, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, C.V Andi Offset, Yogyakarta
- Syahrul Machmud, 2012 *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Lampung
- _____, 2018, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung
- Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, 1993, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yanly Gandawidjaja. 2002. *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung
- .

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlik Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Kitab Undang-undang hukum pidana

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.pr.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan Anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas;

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, *Tentang Jabatan Notaris*.

Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Jabatan Notaris*.

Lihat Pasal 38 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Lihat Lampiran V: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 16-5-2006 tentang ketentuan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembar Bentuk Keputusan Persetujuan Cuti PPAT.

Lihat Lampiran IX: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Lihat Lampiran IX: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Lihat Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Lihat Lampiran I: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 16-5-2006 tentang ketentuan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembar Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Sebagai PPAT

Lihat Lampiran IIIa dan Lampiran IIIb: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tanggal 16-5-2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Lihat Pasal 23 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

C. Jurnal

Djoko Poernomo. 2006. *Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Surabaya. Tesis. PPS Universitas Airlangga

Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005

Hendry Dwicahyo Wanda dan Rusdianto Sesung. 2018. *Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C*. Jurnal. Surabaya. Universitas Narotama Suarabaya

Made Anggara Giri. 2013. *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung*. Lampung. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sri Endah Wahyuningsih, *Jurnal Akta*, Volume 6 Issue 2, June 2019

_____, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Yanti Jacline Jennier Tobing, “*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*”, *Jurnal Media Hukum*, 2010, 23.

INTERNET

<https://faktualnews.co/2019/10/04/kasus-dugaan-serobot-lahan-23-ha-di-sidoarjo-notaris-dyah-tetap-dibui-meski-berkursi-roda/167942/> Dikutip pada tanggal 6 November 2019, pada pukul 22.43 WIB.

<https://kbbi.web.id/akta> dikutip pada tanggal 22 oktober 2019 pada pukul 09.53

<https://kbbi.web.id/analisis> di kutip pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 09.45

<https://kbbi.web.id/autentik> di kutip pada tanggal 22 oktober 2019 pada pukul 09.53

<https://kbbi.web.id/notaris> Dikutip pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 09.50

<https://kbbi.web.id/Pidana> Diakses pada tanggal 6 November 2019 pada pukul 12.59

<https://kbbi.web.id/sanksi> Diakses pada tanggal 6 November 2019 pada pukul 12.59 WIB

<https://m.suarakarya.id/detail/78063/Kasus-Pemalsuan-Akte-Notaris-Ini-Hanya-Jalani-Hukuman-Percobaan>, Dikutip pada tanggal 6 November 2019, pada pukul 22.43

http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN. Di akses pada tanggal 4 Februari 2020 pada pukul 20.30

<http://google.co.id>, *Notaris Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pada pukul 19.28